



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 170/ 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ 21 TAHUN 2023 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** : Surat Plt. Bupati Karanganyar Nomor : 180/5.802.1.3 tanggal 17 November 2023 Hal : Penambahan Usulan Propemperda Tahun 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/21 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/21 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 105);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/21 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 1 Februari 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/21 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024.**

**Pasal I**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/21 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Februari 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,**



**BAGUS SELO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 170/2 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/21  
 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/ PEMRAKARSA	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NAS-KAH AKA-DE-MIK	PENJE-LASAN/ KETE-RANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNI-KASI	Pengaturan Kawasan Pengubahan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);		Ubah	2024		Penjelasan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Dinas Penanaman	Mei	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan - Dihiluskannya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an		
2.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025- 2045	Merupakan Penjabaran Dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Jangka Panjang Untuk 20 Tahun yang Disusun dengan Berpedoman Pada RPJPN dan RTRW	Baru		2024	NA		1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an 2. Seluruh Perangkat Daerah	Mei	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	Perubahan Nomenkatur Baperlitbang menjadi Bapperida; dan Perubahan Tipe B Menjadi Tipe A pada BPBD.		Ubah	2024		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Setda 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mei	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  Perpres Nomor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
4.	PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	Pengaturan tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang Akan Berpengaruh Pada Kualitas Hidup Keluarga dan Masyarakat Baik Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Pada Umumnya	Baru		2024	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mei	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN	Substansi Materi yang Diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bangunan sudah tidak sesuai		Ubah	2024		Penjelasan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Bagian Hukum Setda	Mei	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	Pengaturan tentang penyusunan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Baru		2024	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mei	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	DANA CADANGAN	Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah	Baru		2025	NA		Badan Keuangan Daerah	Mei	Guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
8.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan pengisian perangkat desa; dan</li> <li>- Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.</li> </ul>		Ubah	2024		Penjelasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mei	Mewujudkan kelancaran, efektivitas dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.
9.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber dana jasa pengabdian; dan</li> <li>- Besaran jumlah jasa pengabdian.</li> </ul>		Ubah	2024		Penjelasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mei	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG PADA PT. BPR BKK TASIKMADU	Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas Sertifikat hak pakai nomor 12 seluas 957 m <sup>2</sup> di Bejen Karanganyar	Baru		2024	NA		1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda 2. Badan Keuangan Daerah	Mei	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
11.	PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	Proyeksi Roadmap permodalan sampai dengan tahun 2024 agar share modal tetap 1,04 % (satu koma nol empat persen)	Baru		2024	NA		1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda 2. Badan Keuangan Daerah	Mei	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRA-KARSA	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2024		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober
		b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan		Ubah	2024		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Juni
		c. Pertanggungjawab-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	Baru		2024		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Maret

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

